

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)  
PADA TINGKAT SMA/SMK  
(Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Dan SMK Negeri 1  
Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat)**

**Ricky Falah**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the implementation of the Smart Indonesia Program at the high school/vocational high school level in Majene Regency, West Sulawesi Province. This study was a qualitative descriptive study with a post-positivist approach. The research informants numbered 17 people. The data analysis technique in this study used the interview method and research documentation. The results of the study showed: (1) The implementation of the Smart Indonesia Program at SMA Negeri 1 and SMK Negeri 1 Majene had been carried out well, where the program implementers were able to translate the leadership's decisions; the availability of human resources, finances, facilities and infrastructure, and accountability reports for the program implementation process. (2) Inhibiting factors for the implementation of the Smart Indonesia Program at SMA Negeri 1 and SMK Negeri 1 Majene, among others, many parents of students were not registered as DTKS, there was miscommunication regarding the time of file collection, the student screening process was not on target, and the lack of coordination between the school and the relevant agencies. (3) Efforts to optimize the implementation of the Smart Indonesia Program at SMA Negeri 1 and SMK Negeri 1 Majene, among others, need to increase the quota of students receiving education scholarships, simplify requirements for PIP recipients, increase the nominal amount of education funding assistance, increase cooperation between related parties such as the District Education Office and schools receiving PIP quotas, and minimize errors in inputting student data in Dapodik.*

**Keywords:** *Implementation, Programme, Smart Indonesia*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat SMA/SMK di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *post positivisme*. Informan penelitian berjumlah 17 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Majene sudah dilakukan dengan baik, dimana pelaksana program mampu menerjemahkan keputusan pimpinan; adanya ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan laporan hasil pertanggungjawaban proses pelaksanaan program. (2) Faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Majene, antara lain banyak orangtua siswa belum terdaftar sebagai DTKS, adanya miskomunikasi berkaitan waktu pengumpulan berkas, proses penyaringan siswa kurang tepat sasaran, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas terkait. (3) Upaya mengoptimalkan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Majene, antara lain perlu penambahan kuota siswa penerima beasiswa pendidikan, kemudahan persyaratan bagi penerima PIP, penambahan nominal bantuan dana pendidikan, peningkatan kerjasama antar pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten dengan sekolah penerima kuota PIP, dan meminimalisir kesalahan penginputan data siswa di Dapodik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Indonesia Pintar



## PENDAHULUAN

Visi Pendidikan Nasional merupakan terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam mewujudkannya antara lain, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara.

Lemahnya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang menimpa bangsa Indonesia, antara lain pada saat krisis ekonomi karena ketidakmampuan kita bersaing di pasar global dan tingginya hutang negara pada tahun 1998. Secara regulasi yang mengatur tentang masalah pendidikan terutama dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, tidak pernah secara tegas mengatur berapa besar anggaran yang perlu dialokasikan dalam pendidikan, dalam RAPBN juga setiap tahunnya anggaran untuk pendidikan masih terbilang kurang. Pendidikan

selalu berubah dan berkembang secara progresif sehingga menjadikan pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam hal pengajaran, fasilitas, dan tenaga pengajarpun lebih ditingkatkan dengan tujuan untuk kemajuan negara. Namun pada kenyataannya masih ada persoalan-persoalan di dunia pendidikan yang ada di negara ini.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan siswa/warga yang menempuh pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini memang masih sangat memprihatinkan. Hal ini dinyatakan oleh Badan Program Pembangunan di bawah PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*), yang mana dalam laporan *Human Development Report* 2016 mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2015 dan Biro Pusat Statistik (2018) IPM pada Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia, dimana komposisi ini terdiri dari peringkat

pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala.

Dalam Laporan *World Bank* (2014) juga menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia. Dalam ujian internasional seperti PISA tercatat bahwa peringkat Indonesia berada di bawah banyak negara pembandingnya. Pada tahun 2012, dari 470.000 pelajar berusia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia mendapat peringkat 57 dalam pengetahuan membaca, matematika dan ilmu alam, dengan nilai 402 dari 600 (dibanding rata-rata OECD sebesar 493). Banyak negara Asia lain mendapat peringkat yang jauh lebih baik seperti Republik Rakyat China (peringkat 1, dengan nilai 556), Korea Selatan (2, 539), Hong Kong (4, 533), Singapura (5, 526), Jepang (8, 520), dan Thailand (50, 421). Negara lainnya di luar Asia juga mencatat peringkat yang baik seperti Turki (peringkat 41), Rusia (43), dan Brazil (53).

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia pemerintah telah mengupayakan berbagai program-program yang bertujuan untuk pembangunan pendidikan. Dimulai dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional sekolah bagi satuan pendidikan dasar sebagai penunjang program wajib belajar, hal ini dilakukan untuk menunjang masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya masyarakat miskin. Selain itu, ada juga program-program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan yang sedang ditempuh.

Upaya untuk pembangunan manusia melalui pendidikan masih terus ditingkatkan pemerintah. Pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkat akses masyarakat miskin/tidak mampu dalam

mendapatkan pendidikan. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan manusia melalui program berbasis pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat. Selain itu, PIP ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal (Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2017).

Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar ini dimulai sejak akhir tahun 2014 sebagai pengganti program Bantuan Siswa Miskin (BSM), bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Dengan bantuan Program Indonesia Pintar pemerintah berupaya mengedepankan pendidikan karena sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam kemajuan bangsa. Pemerintah juga berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu/miskin. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga pemerintah berharap tercipta pemerataan pendidikan dan tidak akan ada lagi yang namanya kesenjangan pendidikan dan berharap masyarakat dapat merasakan pendidikan. (Kemendikbud, <http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023).

Tujuan utama dari Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu

siswa kurang mampu/miskin supaya mendapatkan pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan ditetapkannya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan pemerataan pendidikan yang berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa manfaat dari program KIP dapat dirasakan oleh pelajar yang ada di Indonesia dan pada tahun 2017 sasaran KIP akan diperluas lagi di setiap daerah. (Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2017/29/17/17194701/jokowi.manafaat.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar>, diakses pada 27 Juli 2023)

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, namun juga difokuskan di wilayah yang memang masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu daerah yang menjadi sasaran program PIP adalah Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Alasannya adalah Kabupaten Majene dicanangkan sebagai kota pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri seperti Universitas Sulawesi Barat, Universitas Terbuka dan STAIN Majene, ditambah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat.

Penyaluran bantuan kepada siswa/siswi tingkat SMA/SMK di Kabupaten Majene sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Penyaluran bantuan tersebut dibagikan ke dalam beberapa tahapan dan ditujukan kepada seluruh siswa/siswa yang memenuhi kriteria sebagai penerima program PIP. Adapun jumlah bantuan dana yang diterima adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk siswa kelas X dan XI, dan

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk siswa kelas XII.

Penelitian ini difokuskan pada penyaluran bantuan program PIP kepada siswa/siswi di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Alasannya adalah kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang menerima kuota siswa program PIP yang paling banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Majene. Adapun data penyaluran bantuan program PIP kepada siswa SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Majene, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Data Penyaluran Bantuan Program Indonesia Pintar Pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Majene Tahun 2023**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Penerima PIP	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Majene	100	Data Agustus 2023
2	SMK Negeri 1 Majene	21	Data Januari 2023
	<b>Total</b>	<b>121</b>	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa ada ketimpangan pemberian kuota program PIP diantara kedua sekolah tersebut, karena kuota program PIP untuk SMA Negeri 1 Majene cukup besar yaitu sebanyak 100 siswa, dibandingkan dengan kuota program PIP untuk SMK Negeri 1 Majene yang hanya 21 siswa. Pertimbangannya karena siswa SMA Negeri 1 Majene lebih banyak dibandingkan dengan siswa di SMK Negeri 1 Majene. Sehingga ada perbedaan yang cukup signifikan dari jumlah pembagian kuota program PIP pada masing-masing sekolah tersebut.

Sampai dengan saat ini pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih memiliki kendala yang menghambat program tersebut untuk mencapai sasarnya. Masalah paling krusial adalah tidak tepat sasaran dan menjangkau semua *target group* yang telah ditentukan awalnya. Pengetahuan masyarakat akan Program Indonesia Pintar juga menjadi penghambat pelaksanaan program karena pihak sekolah belum maksimal dalam hal publikasi program ini. Sebagai salah satu persyaratan wajib dalam infomasi data siswa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) orangtua maupun siswa itu sendiri masih menjadi kendala. Banyak kasus terhambatnya input data siswa karena NIK orangtua siswa yang belum *update* dalam sistem. Selain data NIK orangtua siswa, masih ada juga kendala sistem selama proses berjalannya program yang menghambat anak kurang mampu/miskin tidak mendapatkan kesempatan mengikuti program PIP, yaitu seringnya proses *update* data dapodik terlambat dikirim ataupun diterima. Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP juga tidak memadai.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di

Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan guna mengoptimalkan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program, yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Riggs, 2015:54).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya

organisasi, interpretasi dan penerapan.

Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksananya. Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut *input* kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratminto, 2015:4).

## 2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Puslapdik). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan pendidikan bagi siswa/siswi yang tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya tanpa ada kendala (Zahimu, 2018).

Program Indonesia Pintar ini bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut sangatlah membantu agar peserta didik tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya program tersebut dana PIP dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli kebutuhan

perlengkapan sekolah seperti membeli seragam sekolah, alat tulis serta buku. Program Indonesia Pintar memiliki peran yang sangat penting bagi dunia pendidikan yaitu sebagai aksesibilitas pendidikan yang membantu pemerataan dalam mengakses pendidikan, sehingga peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan (Rohaeni, 2018).

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021, dijelaskan bahwa tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c. Menarik Peserta Didik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Sasaran Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar dan menengah dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021, adalah:

- a. PIP Dikdasmen diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin dengan prioritas sasaran:
  - 1) Peserta Didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - 2) Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    - a) Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
    - b) Peserta Didik yang baru kembali bersekolah akibat putus sekolah (*drop out*);
    - c) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
    - d) Peserta Didik korban musibah di daerah konflik;
    - e) Peserta Didik berkebutuhan khusus (disabilitas);
    - f) Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau
    - g) Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.
- b. Peserta Didik Pemegang KIP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan Peserta Didik sesuai dengan data Peserta Didik Pemegang KIP.
- c. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakan Peserta Didik berdasarkan usulan dari:
  - 1) Dinas Pendidikan Provinsi;
  - 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 3) Pemangku Kepentingan.

Besaran Biaya dan Peruntukan Bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021, bantuan PIP pendidikan dasar dan menengah dibeikan kepada setiap siswa yang berhak sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima, sebanyak 1 (satu) kali atau 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian besaran seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Besaran Biaya dan Peruntukan Bantuan Program Indonesia Pintar**

Sasaran Penerima	Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Genap	Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Gasal
SD/SDLB/Paket A	- Rp 225.000,00 untuk Kelas VI. - Rp 450.000,00 untuk Kelas I, II, III, IV, dan V.	- Rp 225.000,00 untuk Kelas I. - Rp 450.000,00 untuk Kelas II, III, IV, V, dan VI.
SMP/SMPLB/Paket B	- Rp 375.000,00 untuk Kelas IX. - Rp 750.000,00 untuk Kelas VII dan VIII.	- Rp 375.000,00 untuk Kelas VII. - Rp 750.000,00 untuk Kelas VIII dan IX.
SMA/SMALB/SMK/Paket C	- Rp 500.000,00 untuk Kelas XII. - Rp 1.000.000,00 untuk Kelas X dan XI.	- Rp 500.000,00 untuk Kelas X. - Rp 1.000.000,00 untuk Kelas XI dan XII.
SMK Program 4 tahun	- Rp 500.000,00 untuk Kelas XIII. - Rp 1.000.000,00 untuk Kelas X, XI, dan XII.	- Rp 500.000,00 untuk Kelas X. - Rp 1.000.000,00 untuk Kelas XI, XII, dan XIII.

Sumber: Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa besaran biaya bantuan Program Indonesia Pintar berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan dan tahun pelajarannya. Besaran Program Indonesia Pintar tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan peserta didik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah paradigma *postpositivisme*. Penelitian ini mengangkat tema tentang implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK khususnya pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Keterkaitan paradigma penelitian *post positivisme* dengan penelitian ini adalah tema penelitian dijabarkan secara deduktif menggunakan teori, dengan begitu desain ini benar-benar kuantitatif. Ketika mulai memasuki tahap analisis data desain berubah menjadi penelitian kualitatif dimana penelitian dilakukan secara induktif

melalui cara berpikir peneliti dalam menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan penelitian *rapid assessment procedure*, yaitu cara untuk memperbaiki dan memahami keberhasilan masalah yang dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini relevan digunakan, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK khususnya pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksana program, tokoh masyarakat, orangtua siswa dan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang

terdiri atas informan internal dan eksternal. Adapun kriteria pemilihannya sebagai berikut:

1. Pelaksana Program PIP.
2. Tokoh masyarakat di Kabupaten Majene.
3. Orangtua siswa dan siswa penerima bantuan Program PIP.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2010:209), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, namun juga difokuskan di wilayah yang memang masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu daerah yang menjadi sasaran program PIP adalah Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Penyaluran bantuan kepada siswa/siswi tingkat SMA/SMK di Kabupaten Majene sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Penyaluran bantuan tersebut dibagikan ke dalam beberapa tahapan dan ditujukan kepada seluruh siswa/siswa yang memenuhi kriteria sebagai penerima program PIP. Adapun jumlah bantuan dana yang diterima adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk siswa kelas X dan XI, dan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk siswa kelas XII.

Sampai dengan saat ini pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih memiliki kendala yang menghambat program tersebut untuk mencapai sasarannya. Masalah paling krusial adalah tidak tepat sasaran dan menjangkau semua *target group* yang

telah ditentukan awalnya. Pengetahuan masyarakat akan Program Indonesia Pintar juga menjadi penghambat pelaksanaan program karena pihak sekolah belum maksimal dalam hal publikasi program ini. Sebagai salah satu persyaratan wajib dalam informasi data siswa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) orangtua maupun siswa itu sendiri masih menjadi kendala. Banyak kasus terhambatnya input data siswa karena NIK orangtua siswa yang belum *update* dalam sistem. Selain data NIK orangtua siswa, masih ada juga kendala sistem selama proses berjalannya program yang menghambat anak kurang mampu/miskin tidak mendapatkan kesempatan mengikuti program PIP, yaitu seringnya proses *update* data dapodik terlambat dikirim ataupun diterima. Berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP juga tidak memadai.

Hasil penelitian tentang implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK khususnya pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menemukan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan dana pendidikan dari Kemendikbudristek yang diberikan kepada siswa/siswi melalui sinkronisasi data dapodik sekolah, yang tentunya diberikan dengan syarat dan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan dari kebijakan Program Indonesia Pintar ini adalah untuk memberikan pendidikan yang layak dengan memberikan bantuan dana secara langsung untuk mencegah terjadinya putus sekolah terhadap anak-anak yang memiliki potensi namun tidak memiliki kemampuan finansial

yang memadai. Sementara itu manfaat program PIP adalah siswa yang tidak mampu dapat terus sekolah sampai dengan selesai mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Program ini juga menjadi salah satu cara untuk mencegah anak putus sekolah karena tidak punya biaya pendidikan yang cukup hingga selesai pendidikan menengah atas. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa PIP, yaitu anak harus terdaftar sebagai siswa/siswi di sekolah yang menjadi target penerima bantuan, dan anak terdaftar sebagai peserta DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat sudah dilakukan dengan baik, yang ditunjukkan dengan kemampuan pelaksana program dalam menerjemahkan keputusan yang telah ditetapkan; ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang cukup, pemahaman pelaksana program dalam efisiensi kegiatan, dan adanya laporan hasil pertanggungjawaban proses pelaksanaan program. Secara umum implementasi program PIP di lapangan sudah baik. Banyak orangtua siswa yang merasa terbantu dengan adanya program PIP ini, karena beban biaya pendidikan maupun keperluan sekolah siswa sudah dibantu oleh pemerintah.

Faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain masih banyak orangtua siswa/siswi yang belum terdaftar sebagai DTKS, adanya miskomunikasi antara siswa dengan pihak sekolah berkaitan dengan waktu pengumpulan berkas, proses penyaringan siswa yang layak untuk

mendapatkan bantuan kurang tepat sasaran, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas terkait.

Upaya dalam mengoptimalkan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain dengan penambahan kuota siswa penerima beasiswa pendidikan, kemudahan persyaratan bagi penerima PIP kedepannya, penambahan nominal bantuan dana pendidikan dari yang didapatkan saat ini, peningkatan kerjasama antar pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten dengan sekolah-sekolah yang diberikan kuota PIP, dan meminimalisir kesalahan penginputan data siswa di Dapodik yang dapat mempengaruhi diterima tidaknya siswa sebagai penerima bantuan program PIP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luruk dan Suprobawati (2022), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar dikeluarkan karena rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin, karena tingginya biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan ini berpijak pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan tentang implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMA/SMK khususnya pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, maka penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat sudah dilakukan dengan baik, yang ditunjukkan dengan kemampuan pelaksana program dalam menerjemahkan keputusan yang telah ditetapkan; ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang cukup, pemahaman pelaksana program dalam efisiensi kegiatan, dan adanya laporan hasil pertanggungjawaban proses pelaksanaan program. Secara umum implementasi program PIP di lapangan sudah baik. Banyak orangtua siswa yang merasa terbantu dengan adanya program PIP ini, karena beban biaya pendidikan maupun keperluan sekolah siswa sudah dibantu oleh pemerintah.
2. Faktor penghambat implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain masih banyak orangtua siswa/siswi yang belum terdaftar sebagai DTKS, adanya miskomunikasi antara siswa dengan pihak sekolah berkaitan dengan waktu pengumpulan berkas, proses penyaringan siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan kurang tepat sasaran, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas terkait.
3. Upaya dalam mengoptimalkan implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain dengan penambahan kuota siswa penerima beasiswa pendidikan, kemudahan persyaratan bagi penerima PIP kedepannya, penambahan nominal bantuan dana

pendidikan dari yang didapatkan saat ini, peningkatan kerjasama antar pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten dengan sekolah-sekolah yang diberikan kuota PIP, dan meminimalisir kesalahan penginputan data siswa di Dapodik yang dapat mempengaruhi diterima tidaknya siswa sebagai penerima bantuan program PIP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akyas, Azhari. (2014). *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta Selatan: Penerbit Teraju.
- Atmodiwirio. Soebagio. (2015). *Manajemen Pelatihan*. Jakarta: Ardadizya Jaya.
- Baharudin dan Esa Nurwahyuni. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basrowi dan Suwandi. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2015). *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*. Gava Media: Yogyakarta.
- Furchan, Arif. (2015). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Affan. (2017). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guba, E.G. (2010). *The Paradigm Dialog*. Newbury Park, CA: Sage.
- Hafid, Anwar, et al. (2015). *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamidi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayati, Nurhasana dan Eka Yuliana Sari. (2019). *Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 03 Mei 2019. 468-480.
- Ihsan, Fuad. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Irfan, Andri., Harry Nenobais dan Darmanto. (2021). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Sebuah Pendekakatan Kebijakan Publik)*. Banyumas: Amerta Media.
- Keban, Yeremias T. (2017). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kemendikbud,  
<http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
- Kompas.com,[http://nasional.kompas.com/read/2017/29/17/17194701/joko\\_wi.manfaat.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar](http://nasional.kompas.com/read/2017/29/17/17194701/joko_wi.manfaat.kartu.indonesia.pintar.terus.dirasakan.pelajar), diakses pada 27 Juli 2023.
- Luruk, Benedikta dan Dewi Suprobawati. (2022). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Studi Kasus SMA Negeri 2 Elar Wukir Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur*. Jurnal Inovasi Sektor Publik. Vol. 2, No. 3. 1-12.
- Manila, I.GK. (2016). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moses, Melmambessy. (2017). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*. Media Riset Bisnis & Manajemen. Vol. 12, No. 1. 18-36.
- Nasution. (2015). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurokhmah. (2021). *Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan*. Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia. Vol. 2, No. 1. 37-48.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. (2015). *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan*

- Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riggs, Fred W. (2015). *Administrasi Negara-Negara Berkembang-Teori Masyarakat Prismatik*. Jakarta: PT Rajawali.
- Rohaeni, N. Eni dan Oyon Saryono. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Indonesian Journal of Education & Administration Review. Vol. 2, No. 1. 194-204.
- Rohman, Arif. (2016). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Septiawati, Siti Erfina., Tri Prasetyowati, dan Fierda Nurany. (2022). *Analisis Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) Perspektif Good Governance di Lingkungan Madrasah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol. 11, No. 3. 267-274.
- Sugihartono, dkk. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Arif Andi. (2014). *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Tilaar, H.A.R., dan Riant Nugroho. (2017). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triyanto, Teguh. (2018). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Solichin Abdul. (2018). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, Hengki. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologi.
- Zahimu, Hartini. (2018). *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017*. Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1.
- Zuldafrial. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.